



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh Kode Pos 23617
Laman acehbaratkab.go.id, Pos-el setdakab@acehbaratkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 544 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 26 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2025

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan usulan
Perencanaan Program Pembentukan Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Barat Tahun 2025, Keputusan
Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2025, perlu diubah;
b. bahwa untuk maksud dalam huruf a, perlu menetapkan
dengan Suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Aceh Barat di Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Barat Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Aceh Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Barat Tahun 2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat (DPA-SKPK) masing-masing pada Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 11 September 2025 M

18 Rabiul Awal 1447 H



a.n. BUPATI ACEH BARAT
Plt. SEKRETARIS DAERAH

WISTHA NOWAR

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
4. Para SKPK Pemrakarsa;
5. Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 544 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN
PROGRAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2025

PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2025

NO	SKPK		TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KET
				RUTIN	REVISI	BARU				
1.	Dinas Perkebunan dan Pternakan		Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD- KSB)	-	-	√	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Pengaturan yang memuat program dan kegiatan terkait pengembangan dan pembangunan sektor perkebunan komoditi kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat	2025	-
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.	Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	-	√	-	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Pedoman dalam Proses Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Aceh Barat	2025	-

		2.	Mall Pelayanan Publik (MPP)	-	-	√	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Operasionalisasi Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	2025	-
3.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.	Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartite Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	pengaturan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah	2025	-
		2.	Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	Merumuskan Kebijakan Pengupahan yang akan diajukan dan ditetapkan oleh Bupati serta untuk pengembangan sistem pengupahan	2025	-

		3.	Aturan Pelaksana Qanun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan	-	-	√	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Perencanaan Tenaga Kerja Informasi Ketenagakerjaan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Asing Hubungan Industrial dan Kerja Perlindungan dan Jaminan Sosial Pelayanan Ketenagakerjaan Pembinaan, Pengawasan Penyidikan	2025	-
4	Bagian Organisasi	1.	Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.	Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	2025	-
		2.	Pembentukan UPTD Gedung Olah Raga Seni (GOS)	-	-	√	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	pengaturan Pembentukan UPTD GOS	2025	-
5.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	1.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Pelayanan Kepemudaan	2025	-

		2.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Pembangunan Kepariwisata	2025	-
6.	Bappeda	1.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026	-	-	√	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	mekanisme umum pemerintah, Permasalahan dan Isu Strategis, Kerangka Ekonomi dan Keuangan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan, Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	2025	-
		2.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025	-	-	√	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Dasar pertimbangan Perubahan RKPD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan, Kerangka Ekonomi dan Keuangan, Sasaran dan prioritas Pembangunan, Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah, Kerangka Pendanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	2025	-
		3.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	-	-	√	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan	2025	-

		4.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	-	-	√	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan	2025	-
7.	RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	1.	Mekanisme Penggunaan Dana dari Pendapatan Jasa Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh	-	-	√	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	sebagai pedoman dan dasar hukum pembagian jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.	2025	-
		2.	Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Pedoman bagi seluruh Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Aceh Barat pada sektor pengadaan barang/jasa sekaligus menjadi parameter pemeriksaan audit pengadaan barang/jasa	2025	-
		3.	Sistem Remunasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh	-	-	√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Pedoman dalam pemberian remunasi dilingkup Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh	2025	-
8.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025	-	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	sebagai pedoman dalam pengaturan biaya tertinggi yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil tertentu, baik untuk barang maupun jasa	2025	-

9.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	-	√	-	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melindungi pekerja perkebunan sawit dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.	2025	-
10.	DPMG	1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik Baru dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025	-	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam mengalokasikan penghasilan perangkat Gampong dalam APBG yang bersumber dari ADG dan Tambahan penghasilan tetap	2025	-
		2.	Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025	-	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	ADG dan Dana Bagi Hasil PDRD merupakan bagian dari Pendapatan Transfer gampong yang diterima oleh Gampong dari Pemerintah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan gampong pada kelompok belanja lainnya.	2025	-

		3.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025	-	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong	2025	-
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Pedoman jangka waktu arsip yang mengatur usia/masa simpan arsip dan nasib akhir arsip yang merupakan arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama SKPK	2025	-
12.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten	Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan PBB-P2	2025	-
13.	RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh		Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Kartu Aceh Barat Sehat dan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perseorang	Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pelaksanaan Program kartu sehat Aceh Barat dan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Kabupaten Aceh Barat	2025	-

14.	Bappeda	Tata Cara Penetapan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi kepada Gampong di Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	pedoman pemberian bantuan khusus kepada Pemerintah gampong dalam rangka mewujudkan pembangunan kabupaten yang ekologis	2025	-
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Pedoman bagi semua pihak dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan kegiatan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan	2025	-
16	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi	-	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pedoman dalam pemberian dan pertanggungjawaban belanja subsidi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	2025	-
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Adat Perkawinan Kabupaten Aceh Barat	-	-	√	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	sebagai Pedoman adat Perkawinan di Aceh Barat	2025	-
18.	PUPR	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2045	-	-	√	Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah	Pedoman dalam Pengelolaan Sampah di Daerah	2025	-

19.	RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh	-	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	pedoman pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh	2025	-
20.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten	-	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBK	2025	-
21.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga	-	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja yang tidak terduga yang bersumber dari APBK Aceh Barat	2025	-

22.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025	-	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar dalam Penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat	2025	-
23.	Bagian Organisasi	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat			√	Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat	Pembentukan UPTD Pengelola Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat		



h.n. BUPATI ACEH BARAT
Plt. SEKRETARIS DAERAH

WISTHA NOWAR